

#PekebunLestari

MONITORING DAN EVALUASI PETA JALAN KAKAO LESTARI KABUPATEN LUWU UTARA

SUSTAINABLE FARMING IN TROPICAL ASIAN LANDSCAPES (SFITAL)

darikebunkelanskapsehat.id

Pengantar

Proses penyusunan kebijakan melibatkan siklus mulai dari identifikasi isu hingga **Monitoring dan Evaluasi.** Monitoring dan Evaluasi (M&E) memegang peranan penting dalam menilai implementasi kebijakan (peta jalan) dan menghasilkan rekomendasi bagi pencapaian tujuan.

Monitoring menggambarkan aktivitas yang ditujukan untuk **memberikan informasi** tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Tujuan monitoring:

1. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran
2. Menemukan kesalahan pelaksanaan kebijakan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar
3. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan demikian.

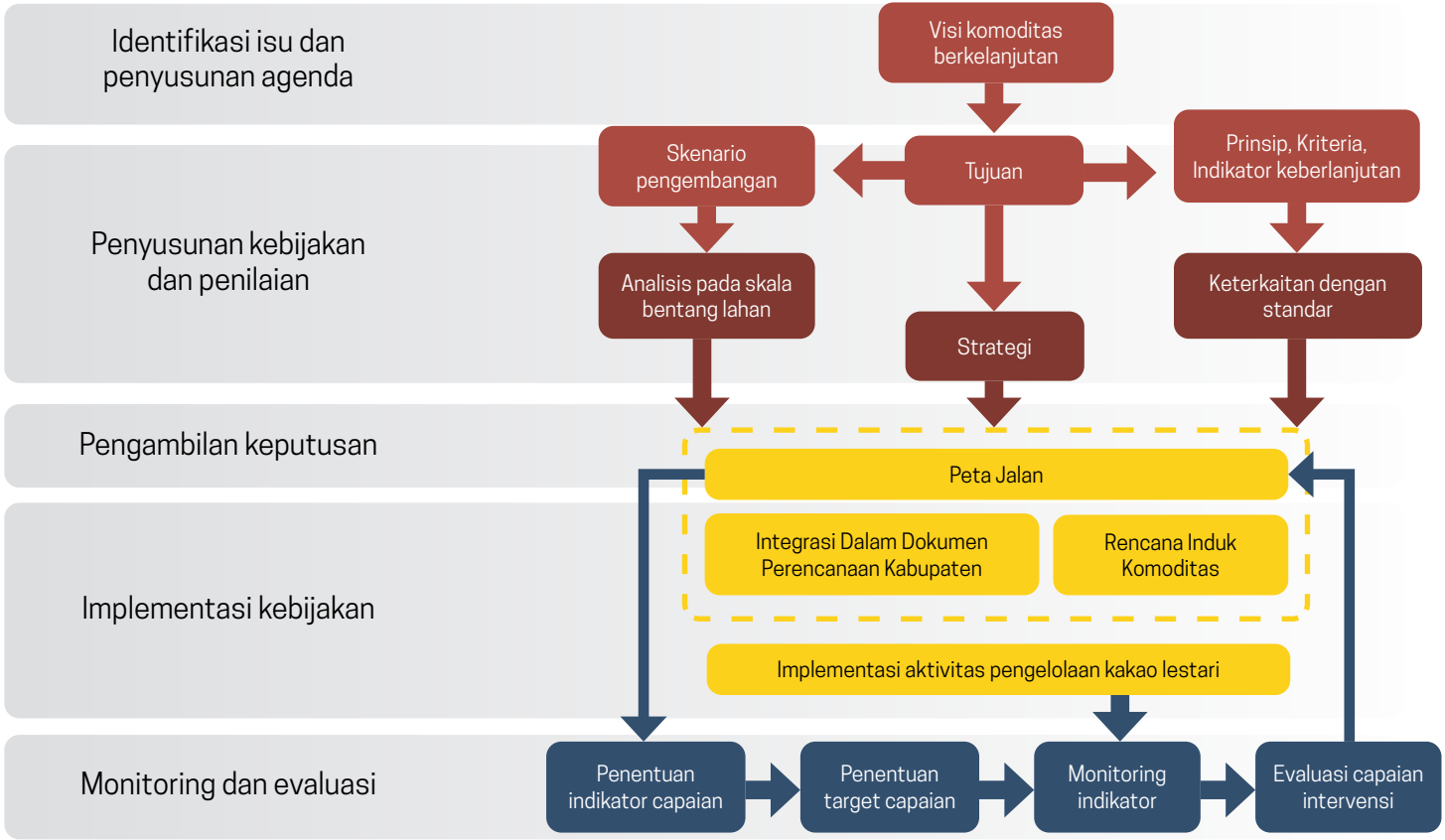
Evaluasi adalah kegiatan untuk **menilai tingkat kinerja** suatu kebijakan dan ketercapaian tujuan/target.

Tujuan evaluasi:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
3. Mengukur tingkat keluaran
4. Mengukur dampak suatu kebijakan
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan
6. Untuk menghasilkan rekomendasi bagi perencanaan dan perbaikan di masa depan

Siklus Penyusunan Kebijakan

Tahapan Penyusunan Peta Jalan Kakao Lestari

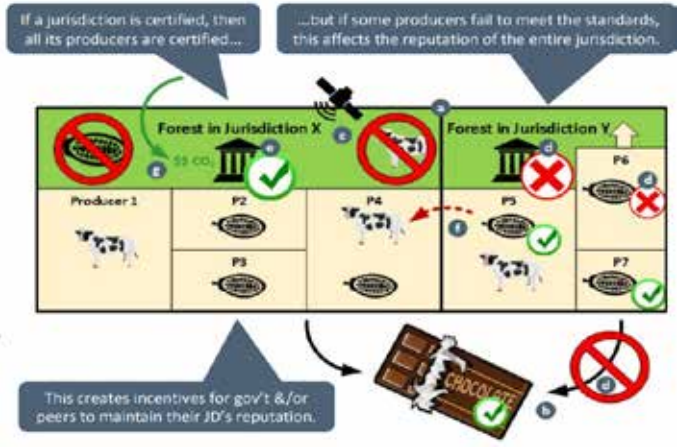


Pendekatan Jurisdiksi dalam Monitoring dan Evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari

Apa itu pendekatan jurisdiksi?

Jurisdiksi adalah unit politik baik di tingkat nasional maupun sub-nasional (misalnya provinsi, kabupaten, atau kota). **Pendekatan pengelolaan komoditas berdasarkan jurisdiksi** merupakan perpaduan antara pendekatan perencanaan wilayah (dimana pemerintah menentukan area lindung dan area budidaya (*go or no-go area*) dan pendekatan sertifikasi komoditas berkelanjutan. Deskripsi pendekatan jurisdiksi:

1. Melibatkan perusahaan yang berkomitmen untuk **membeli komoditas berkelanjutan**
2. Melibatkan pemerintah yang **menetapkan area lindung dan budidaya**
3. Apabila jurisdiksi dinyatakan memiliki **pengelolaan komoditas berkelanjutan, maka seluruh produsen** juga menyandang predikat serupa.
4. Jika ada produsen yang melanggar aturan maka seluruh jurisdiksi mendapat penilaian buruk.
5. Ada **insentif bagi produsen** untuk mematuhi aturan secara kolektif.



Sumber: Boshoven et al., 2020. Jurisdictional sourcing: Leveraging commodity supply chains to reduce tropical deforestation at scale. A generic theory of change for a conservation strategy, v1.0. Conservation Science and Practice. DOI: 10.1111/csp2.383

Peran sistem monitoring dan evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari dapat:

1. Memfasilitasi pemantauan terhadap implementasi peta jalan
2. Menjadi basis data untuk melihat performa jurisdiksi dan menilai tingkat keberlanjutan pengelolaan komoditas di suatu jurisdiksi
3. Menjadi basis data bagi evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah
4. Menjadi basis data untuk pemantauan performa indikator yang terhubung dengan instrument penilaian keberlanjutan lainnya.

Sinergitas Monitoring dan Evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari dengan Berbagai Instrumen

Berbagai Alat Bantu Penilaian Pengelolaan Komoditas dan Jurisdiksi

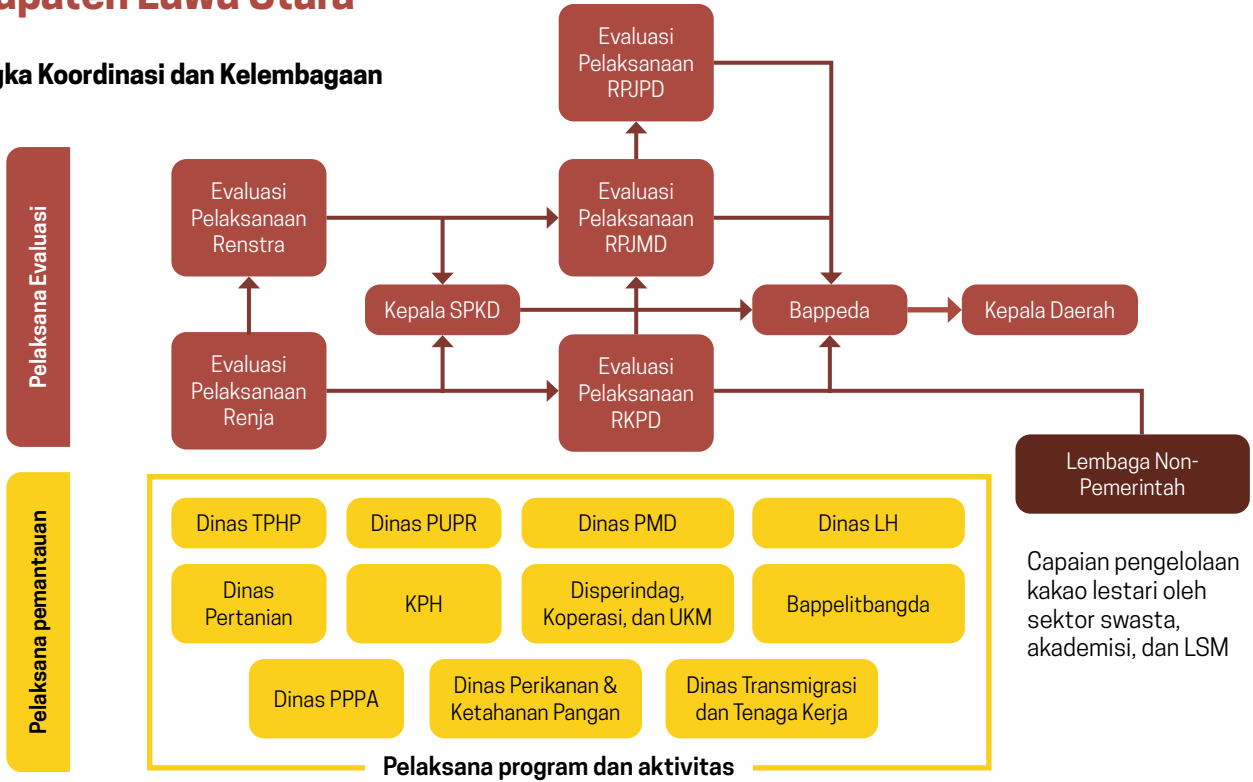
No.	Alat bantu	Aspek yang dicakup		Aspek yang tidak dicakup	
1.	Green Jurisdiction Database	(i) (ii) (iii) (iv)	Performa jurisdiksi Peta interaktif, Penilaian proteksi hutan dan produksi pertanian di jurisdiksi, Data komitmen, aksi, dan program pemerintah	(v) (vi) (vii)	Rantai pasok/rantai nilai Indikator keberlanjutan tidak clear disebutkan Data performa jurisdiksi sangat luas
2.	Trase supply chain	(i) (ii) (iii) (iv) (v)	Data rantai nilai/pasok Aliran rantai pasok Peta interaktif Penilaian indikator keberlanjutan Peta logistik	(vi) (vii)	Bukan full traceability, tidak mencakup data produsen secara spesifik Data komitmen jurisdiksi

No.	Alat Bantu	Aspek yang dicakup	Aspek yang tidak dicakup
3.	Koltiva	(i) Full traceability (ii) Data produsen (iii) Data input pertanian (iv) Data aktor perantara (v) Data transaksi	(vi) Penilaian indikator keberlanjutan (?) (vii) Data komitmen jurisdiksi
4.	Geotraceability	(i) Data performa jurisdiksi (ii) Full traceability (iii) Data produsen (iv) Peta produsen (v) User story – kegiatan produsen (vi) Penilaian indikator keberlanjutan (vii) Peta rantai pasok (viii) Pivot	(ix) Peta interaktif/indikator
5.	Terpercaya	(i) Profil jurisdiksi (ii) Penilaian indikator keberlanjutan	Bukan full traceability, modul rantai pasok, data komitmen, peta interaktif
6.	SourceUp	Untuk jurisdiksi: (i) Data performa jurisdiksi (ii) Penilaian indikator keberlanjutan (iii) Data partner/buyer	Untuk perusahaan: (i) Portfolio trend (ii) Supported jurisdiction (iii) Supported project (iv) Penilaian indikator keberlanjutan (v) Data rantai pasok/nilai (vi) Peta interaktif

Tagging indikator peta jalan kakao lestari dalam berbagai instrumen: **https://bit.ly/indikatorkakao**

Mekanisme Rancangan Monitoring dan Evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari Kabupaten Luwu Utara

Kerangka Koordinasi dan Kelembagaan



Capaian pengelolaan kakao lestari oleh sektor swasta, akademisi, dan LSM

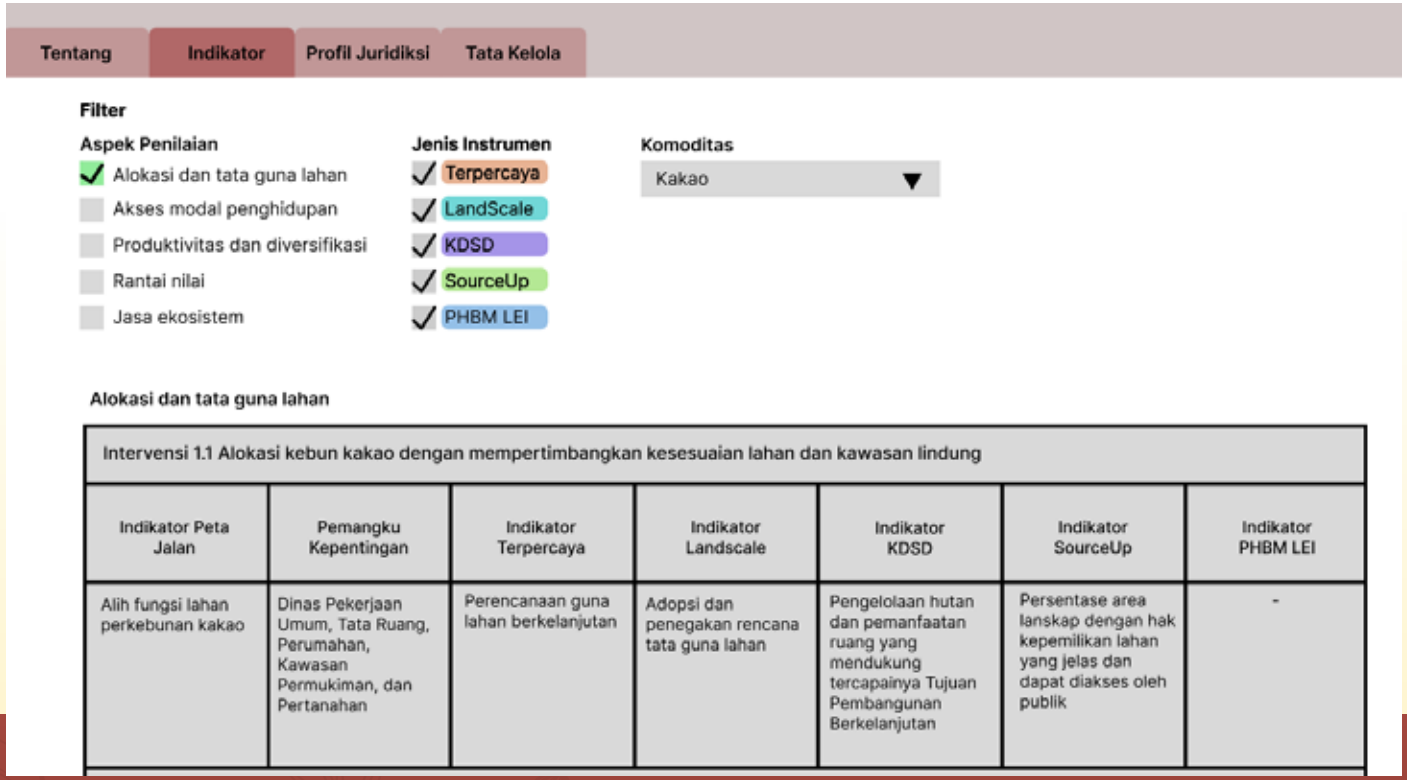
Rancangan Alat Bantu Monitoring dan Evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari

Tujuan pembangunan tools:

1. Membantu pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lain untuk melihat performa suatu jurisdiksi terkait pengelolaan komoditas berdasarkan berbagai indikator
2. Memudahkan pemangku kepentingan untuk memilah indikator sesuai dengan instrumen penilaian yang ingin dipenuhi (Terpercaya, Landscale, KDSD, Roadmap, Ekolabel, SourceUp).
3. Memantau performa jurisdiksi terkait pengelolaan komoditas berkelanjutan dari waktu ke waktu
4. Mengidentifikasi institusi yang bertanggung jawab untuk setiap indikator yang dibangun

Komponen alat bantu:

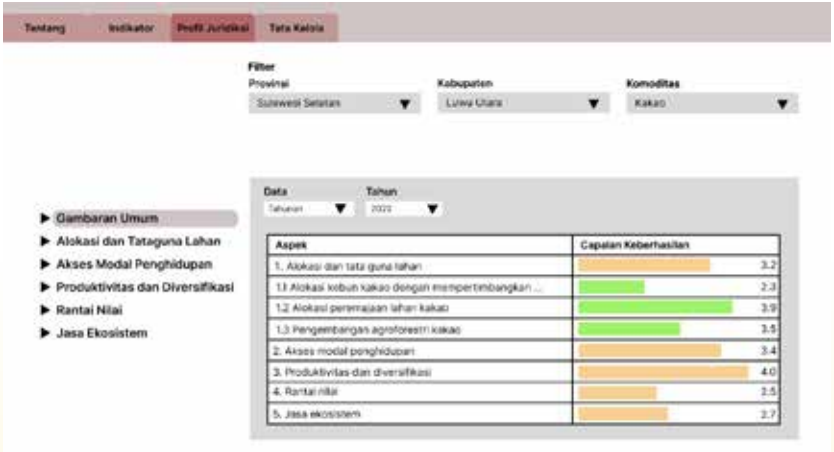
- Modul 1: Tentang - memuat penjabaran terkait penggunaan alat bantu, latar belakang penyusunan, dan versi.
- Modul 2: Indikator - memuat penjabaran indikator yang digunakan dan tagging terhadap berbagai instrument penilaian yang ada.



Alokasi dan tata guna lahan

Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan kawasan lindung						
Indikator Peta Jalan	Pemangku Kepentingan	Indikator Terpercaya	Indikator Landscale	Indikator KDSD	Indikator SourceUp	Indikator PHBM LEI
Alih fungsi lahan perkebunan kakao	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Perencanaan guna lahan berkelanjutan	Adopsi dan penegakan rencana tata guna lahan	Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase area lanskap dengan hak kepemilikan lahan yang jelas dan dapat diakses oleh publik	-

- Modul 3: Profil Jurisdiksi - memuat data performa dan target capaian jurisdiksi berdasarkan indikator peta jalan kakao lestari









- Modul 4: Komitmen jurisdiksi – memuat data komitmen pemeirtah daerah dan aksi yang telah dilakukan maupun kolaborasi untuk mencapai pengelolaan komoditas berkelanjutan



World Agroforestry (ICRAF)
Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang,
Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia; Tel: +(62) 251 8625 415;
Fax: +(62) 251 8625416; Email: icraf-indonesia@cgiar.org

www.worldagroforestry.org/country/Indonesia
www.worldagroforestry.org/agroforestry-world